Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.156-168)
e-ISSN: 2581-1207

JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
JOURNAL OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

Analisis Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023

Steven Joshua[1*], Alfian Bagas Ferdiansyah[2], Sulistiana[3]
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan[1,2,3]
steven.joshua@kemenkeu.go.id[1*], alfian.ferdiansyah@kemenkeu.go.id[2],
sulistiana.05@kemenkeu.go.id[3]

*penulis korespondensi

Keywords: *Base Sector, LQ Analysis, Pearson Correlation.*

ABSTRACT
This research aims to identify and analyze leading sectors in DKI Jakarta Province and evaluate their impact on DKI Jakarta Province's Original Regional Income (PAD) during the period 2010 to 2023. This research uses secondary data obtained from BPS DKI Jakarta and the Directorate General of Financial Balance Ministry of Finance, which was then analyzed using the Location Quotient (LQ) method. The results of the analysis show that there are 11 leading sectors in DKI Jakarta Province, namely the Construction sector, Wholesale and Retail Trade, Provision of Accommodation and Food and Drink, Information and Communication, Financial Services and Insurance, Real Estate, Corporate Services, Government Administration, Defense and Social Security Mandatory, Education Services, Health Services and Social Activities, and Other Services. With Pearson Correlation, it is found that all Basic Sectors have a strong influence on increasing PAD in DKI Jakarta Province 2010 – 2023.

Kata Kunci: Sektor Basis, Analisis LQ, Korelasi Pearson

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta serta mengevaluasi dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode Location Quotient (LQ). Hasil analisis menunjukkan terdapat 11 sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya. Dengan Korelasi Pearson diperoleh bahwa semua Sektor Basis berpangaruh kuat terhadap peningkatan PAD di Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2023.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan khusus yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia hingga saat ini dengan luas wilayah sebesar 664,01 km^2 yang dihuni oleh sebanyak 10,6 juta jiwa. Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai Provinsi terpadat peringkat pertama di Indonesia dengan tingkat kepadatan sebesar 15.978 jiwa/km^2 (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat aktivitas perekonomian di Indonesia (Arief, 2009). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta memberikan sumbangsih terbesar terdahap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dibandingkan 33 Provinsi lainnya di Indonesia dengan persentase sebesar 17,18% (Badan Pusat Statistik, 2021). Persentase ini dapat diperoleh DKI Jakarta yang didukung oleh berbagai sektor ekonomi seperti, sektor *real estate*, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor adm. pemerintahan, dan lain-lain (Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Masing-masing sektor ekonomi yang dimiliki tentu memiliki dampak ekonomi serta kontribusi yang berbeda pula terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakah salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, penanaman modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain sumber pendapatan daerah yang sah (Yuniara & Mais, 2020). Menurut Muta'Ali dalam Ferdiansyah dan Panjaitan (2022) dengan bertambahnya jumlah sektor basis pada sebuah daerah maka akan mendorong peningkatan PAD pada daerah tersebut. Berdasarkan data pada BPS DKI Jakarta dan portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki PAD paling tinggi dibandingkan seluruh Provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tren besaran PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2010 hingga tahun 2023 relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2022 mengalami penurunan akibat Covid-19.

Menurut Vikaliana (2007), sasaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat seiring kebutuhan pembangunan yang juga meningkat. Dalam hal ini, tidak seluruh sektor ekonomi daerah mempunyai kemampuan pertumbuhan yang sama. Sehingga, suatu daerah akan cenderung memanfaatkan sektor – sektor basis yang dianggap lebih memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini disebabkan karena saat sektor basis suatu daerah melakukan ekspor barang/jasa ke luar daerah tersebut, akan terjadi arus pendapatan yang diperoleh dari luar daerah yang meningkatkan investasi serta konsumsi secara signifikan sehingga memberikan *multiplier effect* yang mempengaruhi sektor-sektor lain secara menyeluruh (Ufittri & Puspitasari, 2022). Sehubungan hal tersebut, diperlukan identifikasi terhadap sektor basis yang terdapat pada sebuah daerah agar dapat mengoptimalkan PAD yang dapat diperoleh oleh suatu daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis ingin menganalisis lebih dalam apakah dengan mengoptimalkan peran sektor basis dalam perekonomian pada DKI Jakarta dapat berkontribusi terhadap PAD DKI Jakarta secara signifikan atau tidak. Selain itu, informasi yang akan diperoleh dapat membantu mengidentifikasi potensi sektor perekonomian lain yang masih dapat dioptimalkan.

Kajian Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama yang penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah atau negara tertentu ialah melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau negara tertentu. Pertumbuhan perekonomian di suatu daerah umumnya dilihat dan ditentukan melalui perubahan *output* yang dihasilkan dari daerah tersebut. Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya *output* selama kurun waktu tertentu yang merupakan sebuah tolak ukur yang penting dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan *output* yang dimaksud disini adalah meningkatnya jumlah produksi dari barang atau jasa yang dapat dihasilkan pada suatu daerah tertentu.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari dukungan sektor – sektor lapangan usaha yang akan terus beroperasi dan berkembang untuk menggerakkan roda perekonomian. Di Indonesia, setidaknya terdapat 17 sektor lapangan usaha yang menopang laju pertumbuhan ekonomi hingga saat ini (Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Daerah – daerah di Indonesia memiliki sektor unggulannya masing – masing tergantung dari potensi ekonomi apa yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan di daerah tersebut. Sektor unggulan di suatu daerah diharapkan mampu memberikan dukungan dalam peningkatan *output* ekonomi dan menjadi penopang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, ketika sektor unggulan mampu memberikan dampak positif kepada daerah lain dalam hal perekonomian regional, maka hal itu menjadi sebuah indikasi bahwa produksi barang dan/atau jasa di sebuah tersebut telah memadai (Ferdiansyah, 2022).

Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dan ditujukan dari peningkatan atau penuruhan PDRB dalam suatu daerah (Romhadhoni, Faizah, & Afifah, 2018). PDRB menjadi indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya informasi mengenai nilai tambah produk barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah. Teridentifikasinya nilai tambah tersebut mampu memperlihatkan keadaan perekonomian suatu daerah sedang berkembang dengan baik atau malah sedang terpuruk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui sebuah data statistik yang digambarkan dari besaran nilai tambah atas suatu barang dan/atau jasa yang dapat dihasilkan pada suatu daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Arifin dalam Megasari (2020) mengungkapkan bahwa PDRB adalah nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di satu daerah dan juga menjadi salah satu tolak ukur yang menunjukkan besaran total nilai tambah yang diperoleh atas berbagai aktivitas/sektor perekonomian pada suatu daerah.

PDRB sebagai fungsinya untuk menjadi indikator dalam mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah terbagi menjadi 2 jenis perhitungan, yaitu: PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku dan PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan perubahan nilai barang dan/atau jasa yang dihitung dengan

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, biasanya dihitung untuk mengukur peningkatan prekenomian daerah tanpa dipengaruhi harga. Sedangkan, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan perubahan nilai barang dan/atau jasa dengan berdasarkan atas harga pada tahun berjalan, biasanya dihitung untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi pada suatu daerah.

Tabel 1 Rata-Rata Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Tahun 2010-2023

No	Sektor Lapangan Usaha	Rata-Rata
1	Perdagangan besar & eceran; Resparasi mobil & sepeda motor	16,13%
2	Konstruksi	12,65%
3	Industri Pengolahan	12,50%
4	Jasa keuangan dan asuransi	10,68%
5	Informasi dan komunikasi	10,60%
6	Jasa perusahaan	7,65%
7	Real Estate	6,61%
8	Penyediaan akomodasi & makan minum	4,87%
9	Jasa pendidikan	4,80%
10	Administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial	4,18%
11	Jasa lainnya	3,65%
12	Transportasi dan pergudangan	3,32%
13	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,76%
14	Pengadaan listrik dan gas	0,27%
15	Pertambangan dan Penggalian	0,19%
16	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%
17	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	0,04%
TOTAL PDRB		100,00%

Sumber : Data BPS diolah

Nilai PDRB setiap tahunnya akan selalu mengalami kenaikan atau penurunan pada setiap sektor usahanya, begitu juga dengan nilai PDRB di DKI Jakarta yang senantiasa berubah-ubah setiap tahunnya. Nilai persentase dari hasil akhir sektor-sektor lapangan usaha terhadap total nilai PDRB DKI Jakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1. Diketahui bahwa dari tabel 1 di atas sektor yang paling tinggi kontribusinya terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010-2023 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu, untuk sektor yang paling rendah kontribusinya terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010-2023 adalah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Sektor Basis dan Sektor Nonbasis

Sektor basis atau biasa disebut dengan sektor unggulan akan selalu erat hubungannya dengan persaingan dan perbandingan, baik dalam skala internasional, nasional, maupun regional (Antara, 2007). Suatu sektor akan dikatakan sebagai sektor basis atau unggulan saat hasil dari sektor terkait dari suatu wilayah atau daerah memberikan pengaruh yang

signifikan dan dapat bersaing dengan wilayah lain pada sektor yang sama. Selain itu sektor basis memiliki peran penting dalam menggerakan perekonomian dan keuangan sebuah daerah (Tumangkeng, 2018). Menurut Sjafrizal (2008), sektor unggulan yaitu sektor pada suatu daerah yang memiliki peran sebagai penopang perekonomian suatu daerah karena memiliki keunggulan kompetitif lebih baik dibandingkan dengan sektor usaha yang lain dalam daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu sektor basis pada sebuah daerah memberikan dampak yang cukup signifikan sebagai bagian dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut.

Selain sektor basis atau unggulan, dalam suatu daerah pasti terdapat juga sektor-sektor nonbasis yang kurang diunggulkan. Sektor nonbasis merupakan sektor lapangan usaha pada suatu daerah yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar pada daerahnya (Arsyad, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa sektor nonbasis merupakan sebuah sektor usaha dengan hasil produksi tidak dapat melebihi dari hasil produksi sektor basis karena fokus pelayanan mereka yang hanya sebatas kebutuhan daerahnya saja sehingga berbeda dengan sektor basis yang sudah melayani pasar di luar daerahnya. Dalam hal untuk mengetahui sektor basis dan sector nonbasis di suatu daerah dapat menggunakan dengan sebuah metode yang dinamakan *Location Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan metode pengukuran dengan memperbandingkan porsi jumlah produksi atau nilai tambah sebuah sektor pada sebuah daerah terhadap porsi jumlah produksi atau nilai tambah yang dihasilkan pada sektor yang sama secara nasional (Pratama, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat kemajuan dan kemandirian sebuah daerah tanpa harus bergantung pada TKD. Kemampuan sebuah daerah dalam menghasilkan PAD menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola pelaksanaan otonomi daerah serta telah mewujudkan asas desentralisasi. Menurut Aggraeni (2010), PAD adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari kekayaan sebuah daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, serta digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai PDRD menjelaskan bahwa PAD yaitu sumber pendapatan daerah yang dikumpulkan pada wilayah daerah terkait yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan KND, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Peningkatan tren realisasi PAD akan memberikan dampak positif dalam mendorong perkembangan perekonomian untuk menjadi daerah yang mandiri dengan menurunkan tingkat ketergantungan atas sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah.

Korelasi Pearson

Korelasi Pearson adalah cara yang digunakan untuk melihat kekuatan hubungan korelasi di antara dua atau lebih variabel (Listiawati & Siregar, 2023). Selain itu, korelasi pearson ini dapat digunakan untuk melihat hubungan kedekatan antara dua atau lebih variabel supaya dapat diidentifikasi apakah hubungannya kuat atau tidak (Humas Studio Statistika, 2024). Maka dari itu, penulis menggunakan Korelasi Pearson untuk melihat seberapa kuat hubungan antara sektor basis yang ada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023 terhadap

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk rumus mencari korelasi pearson menurut (Listiawati & Siregar, 2023) adalah :

$$R = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_1)(\sum y_i)}{\sqrt{n(\sum x_i)^2 - (\sum x_i)^2}\sqrt{n(\sum y_i)^2 - (\sum y_i)^2}}$$

Keterangan :
R = Nilai Korelasi Pearson
x_i = Nilai PDRB Sektor Basis i
y_i = Nilai PAD

Sementara itu, untuk hasil dari Korelasi Pearson ini menurut (Sarwono, 2017) adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria Simpulan Korelasi
Sumber: Sarwono (2017)

Nilai	Kategori
0 – 0,25	Lemah
0,25 – 0,50	Cukup
0,50 – 0,75	Kuat
0,75 – 1,00	Sangat kuat

Apbila nilai Korelasi Pearson positif, maka maka hubungan variabel tersebut berbanding lurus. Namun apabila nilai Korelasi Peason negatif, maka hubungan variabel tersebut berbanding terbalik (Listiawati & Siregar, 2023).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehubungan dengan pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan membuktikan hubungan antar variabel yang diperoleh menggunakan langkah-langkah Statistik Inferensia. Variabel yang digunakan dalam penulisan ini merupakan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi DKI Jakarta yang direpresentasikan dengan PDRB Sektor Basis pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 sebagai variabel independen dan realisasi PAD DKI Jakarta tahun 2010 sampai dengan 2023 sebagai variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Publikasi BPS diantaranya data PDB atas harga konstan 2010 Negara Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta diantaranya data PDRB atas harga konstan 2010 Provinsi DKI Jakarta lapangan usaha dari 2010 – 2023, dan data realiasi APBD Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor basis yang ada di suatu daerah yaitu menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Menurut Basuki dan Mujiharjo (2017) metode analisis LQ merupakan sebuah metode untuk dapat membuktikan sebuah daerah

memiliki karakteristik *net importer* atau *net exporter* dalam suatu produk atau suatu sektor tertentu. Sehingga, dengan analisis LQ ini dapat dibuktikan sektor basis apa yang dimiliki pada Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis LQ ini juga sudah umum digunakan dalam berbagai penelitian seperti Wicaksono, I. A. (2010) dalam Analisis LQ sektor dan Subsektor Pertanian Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo, Muljanto, M. A. (2021) dalam Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo serta berbagai penelitian lainnya.

Perhitungan dengan metode analisis LQ didapat sektor basis dengan nilai paling tinggi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 – 2023 adalah sektor jasa perusahaan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang dimuat dalam Kajian Fiskal Regional pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Sektor Jasa Perusahaan sebagai sektor basis di Provinsi DKI Jakarta tentunya relevan dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia yang kegiatan ekonominya tidak hanya didorong oleh produksi namun juga sektor jasa. Untuk melihat pengaruh sektor basis terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 – 2023, maka penulis menggunakan Analisis Korelasi Pearson.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Sektor Basis dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan ekonomi di daerah didukung dari beberapa sektor perekonomian di daerah (Nurbiyanto & Panjaitan, 2022). Sektor perekonomian tersebut terdiri dari 17 sektor lapangan usaha. Dari keseluruhan sektor lapangan usaha tersebut, terdapat sektor basis/unggulan di daerah. Sektor basis menjadi sebuah lapangan usaha yang mampu mencukupi kebutuhan daerah lokal maupun permintaan daerah lain. Dengan begitu, secara tidak langsung sektor basis ini mendukung pendapatan daerah selama sektor tersebut dibutuhkan oleh daerah lain. Namun, dibalik dukungan tersebut, sektor basis bersifat tidak stabil dikarenakan kebijakan pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan sektor mana yang dapat mendukung perekonomian. Selain itu, ketidakstabilan ini juga dikarenakan oleh situasi pasar yang terkadang tidak menentu dan dipengaruhi oleh pasar internasional sehingga berdampak pada perekonomian di daerah (Ferdiansyah & Panjaitan, 2022). Namun, tidak semua sektor basis di daerah mendukung dan berkontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan sektor basis masing-masing daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda setiap daerah.

Sebagai pusat perekonomian di Indonesia, sebagian besar sektor ekonomi potensial berada pada Provinsi DKI Jakarta yang membuat perekonomian DKI Jakarta lebih tinggi dari daerah lain (Nur & Rakhman, 2019). Perekonomian yang tinggi tersebut juga dikarenakan Provinsi DKI Jakarta adalah Ibukota Negara Indonesia yang menjadikan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Perekonomian yang tinggi tersebut juga menyebabkan tingginya PAD pada postur APBD Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun belakangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta memiliki porsi 70% dari total pendapatan daerahnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Sehubungan dengan tingginya PAD tersebut, penulis ingin mengetahui apakah sektor basis/unggulan pada Provinsi DKI Jakarta berpengaruh/memiliki kontribusi terhadap PAD pada DKI Jakarta. Diketahui berdasarkan perhitungan Analisis LQ, sektor yang paling unggul/basis di

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

Provinsi DKI Jakarta adalah Sektor Jasa Perusahaan dengan rata-rata sebesar 4,377 selama periode tahun 2010-2023. Sementara itu, untuk sektor yang paling tidak diuntungkan/paling tidak unggul di Provinsi DKI Jakarta adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata sebesar 0,007 selama periode 2010-2023. Sehubungan hal tersebut, penulis menggunakan metode perhitungan analisis LQ agar dapat mengidentifikasi sektor basis.

Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Secara umum, terdapat 17 klasifikasi sektor lapangan usaha yang ada di Indonesia dengan potensi yang berbeda pada masing-masing sektor. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dari sisi pendapatannya. Pendapatan pada Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD), dan Pendapatan Lainnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Dengan menggunakan perhitungan analisis LQ, sektor lapangan usaha yang terdiri dari 17 jenis dapat diketahui sektor yang menjadi sektor basis dan nonbasis di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel LQ Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 yang terdapat pada Tabel 3, dari 17 sektor lapangan usaha, Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sektor unggulan/basis. Suatu sektor dapat dinyatakan menjadi sektor basis di sebuah daerah adalah sektor dengan nilai perhitungan LQ lebih dari 1 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rata-Rata Hasil Analisis LQ Tahun 2010-2023
Sumber : Data BPS diolah

No	Sektor Lapangan Usaha	Rata-Rata	Ket.
1	Jasa perusahaan	4,377	Basis
2	Jasa keuangan dan asuransi	2,652	Basis
3	Real Estate	2,176	Basis
4	Jasa lainnya	2,089	Basis
5	Informasi dan komunikasi	2,017	Basis
6	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,588	Basis
7	Jasa pendidikan	1,516	Basis
8	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,475	Basis
9	Konstruksi	1,263	Basis
10	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,173	Basis
11	Perdagangan besar dan eceran; Resparasi mobil dan sepeda motor	1,166	Basis
12	Transportasi dan pergudangan	0,817	Non Basis
13	Industri Pengolahan	0,568	Non Basis
14	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,512	Non Basis
15	Pengadaan listrik dan gas	0,251	Non Basis
16	Pertambangan dan Penggalian	0,021	Non Basis
17	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,007	Non Basis

Sektor-sektor dengan LQ lebih dari 1 menunjukkan sektor tersebut selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi DKI Jakarta, juga mampu diekspor ke daerah lain sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan untuk Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2010 – 2023. Selain itu, sektor yang paling unggul di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 – 2023 adalah Sektor Jasa Perusahaan. Sektor Jasa Perusahaan menjadi sektor paling unggul di Provinsi DKI Jakarta karena memiliki nilai rata–rata LQ paling besar yaitu 4,377. Maka dari itu, Sektor Jasa Perusahaan diharapkan mampu memberikan *value added* untuk perekonomian daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Sektor Basis Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan perhitungan Analisis LQ pada Tabel 3, diketahui bahwa ada 11 Sektor Basis yang ada di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2023. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh sektor basis terhadap PAD, penulis menggunakan Analisis Korelasi Pearson. Namun, sebelum mengetahui korelasi dari kedua variabel tersebut, perlu dilakukan pengujian distribusi normal terhadap data PAD dan kesebelas sektor lainnya. Uji distribusi normal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan *software* Minitab 15.

Tabel 4 Hasil Uji Distribusi Data
Sumber : data sekunder diolah

No	Variabel	Nilai KS	P-Value	Simpulan
1	Pendapatan Asli Daerah	0,154	>0,150	Distribusi Normal
2	Jasa Perusahaan	0,169	>0,150	Distribusi Normal
3	Jasa Keuangan & Asuransi	0,143	>0,150	Distribusi Normal
4	Real Estate	0,148	>0,150	Distribusi Normal
5	Jasa Lainnya	0,119	>0,150	Distribusi Normal
6	Komunikasi & Informasi	0,111	>0,150	Distribusi Normal
7	Penyediaan akomodasi & makan minum	0,083	>0,150	Distribusi Normal
8	Jasa Pendidikan	0,163	>0,150	Distribusi Normal
9	Jasa kesehatan & kegiatan sosial	0,128	>0,150	Distribusi Normal
10	Konstruksi	0,214	0,082	Distribusi Normal
11	Administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib	0,151	>0,150	Distribusi Normal
12	Perdagangan besar & eceran; Resparasi mobil & sepeda motor	0,101	>0,150	Distribusi Normal

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel berdistribusi normal. Hal ini karena nilai *P-Value* dari semua data tersebut lebih dari 0,05. Maka dari itu, analisis dapat dilanjutkan dengan analisis Korelasi Pearson untuk menentukan hubungan sektor basis dengan pendapatan asli daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023.

Korelasi Pearson

Untuk mengetahui hubungan sektor basis dengan PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023, penulis menggunakan Korelasi Pearson dan akan dihitung berdasarkan sektor basisnya.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

Tabel 5 Korelasi Sektor Basis terhadap PAD
Sumber: data sekunder diolah

No	Variabel Bebas (Sektor Basis)	Nilai Korelasi	Kategori Korelasi	Sifat
1	PDRB Jasa Perusahaan	0,93	Sangat Kuat	Positif (+)
2	PDRB Jasa Keuangan & Asuransi	0,93	Sangat Kuat	Positif (+)
3	PDRB Real Estate	0,95	Sangat Kuat	Positif (+)
4	PDRB Jasa Lainnya	0,94	Sangat Kuat	Positif (+)
5	PDRB Komunikasi & Informasi	0,88	Sangat Kuat	Positif (+)
6	PDRB Penyediaan akomodasi & makan minum	0,97	Sangat Kuat	Positif (+)
7	PDRB Jasa Pendidikan	0,93	Sangat Kuat	Positif (+)
8	PDRB Jasa kesehatan & kegiatan sosial	0,82	Sangat Kuat	Positif (+)
9	PDRB Konstruksi	0,99	Sangat Kuat	Positif (+)
10	PDRB Administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib	0,78	Sangat Kuat	Positif (+)
11	PDRB Perdagangan besar & eceran; Resparasi mobil & sepeda motor	0,96	Sangat Kuat	Positif (+)

Berdasarkan Korelasi Pearson pada Tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara semua Sektor Basis terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 – 2023 adalah **sangat kuat** dengan nilai korelasi sebesar lebih bedar dari 0,75**.** Hubungan antara PAD dengan seluruh variabel PDRB sektor basis adalah positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai PDRB pada sektor basis tersebut, maka akan meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan

Dengan menggunakan analisis LQ untuk menentukan sektor unggulan atau basis di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga 2023, penelitian ini dapat menemukan sebelas sektor basis meliputi: konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makanan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jasa lainnya. Pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kesebelas sektor basis yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2010 – 2023. Selain itu, keseluruhan arah hubungan korelasi tersebut menunjukkan positif yang berarti semakin tinggi nilai PDRB pada sektor basis maka akan meningkatkan nilai pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor basis berpengaruh kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Lestari, 2013) diperoleh hasil bahwa sektor basis berpangaruh signifikan dan positif terhadap kenaikan PAD. Hal ini selaras juga dengan penelitian (Dewinta, 2022) diperoleh hasil bahwa sektor basis secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian lainnya diperoleh satu sektor basis berupa konstruksi yang signifikan berpengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Dairi (Sianturi & Tanjung, 2020). Maka

dari itu, hasil yang didapat penulis pada penelitian ini adalah sektor basis berpengaruh kuat terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada artikel di atas yaitu terdapat 11 sektor basis yang ada di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2023. Selain itu, dengan menggunakan Korelasi Pearson, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor basis terhadap pendapatan asli daerah sangat kuat di setiap sektor basisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai PDRB di setiap sektor basis, maka akan meningkatkan nilai pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dengan memiliki PAD yang cukup signifikan setiap tahunnya, diharapkan dapat mendukung sektor nonbasis untuk dapat dikembangkan menjadi sektor basis dan dapat menambah nilai pendapatan asli daerah.

Atas kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan terbesar dalam PAD melalui (a) melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor yang belum terdaftar dengan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Jasa Raharja (b) melakukan penyuluhan dan edukasi oleh dinas terkait sehubungan dengan urgensi dan manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan, 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan pelatihan SDM secara rutin sehubungan pembekalan materi dan teknis kepada sektor Jasa Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil dan sektor Jasa Perusahaan lainnya yang memerlukan keahlian khusus dalam menjalankan usahanya, 3) mendorong kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Perusahaan melalui kemudahan dalam perizinan usaha, 4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menggali dan mengembangkan kembali sektor-sektor yang masih menjadi sektor nonbasis supaya dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang mandiri.

Selain itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah (1) melakukan wawancara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagian BPKAD untuk memastikan keakuratan data dan untuk memvalidasi hasil penelitian ini, (2) menambah variabel independen yang digunakan dalam penelitian, (3) melakukan penelitian pada daerah lain yang memiliki sektor basis yang sama untuk mengetahui apakah sektor basis tersebut berpengaruh terhadap PAD atau tidak, (4) melakukan analisis lain selain analisis korelasi untuk semua sektor basis dan dihubungkan dengan PAD.

Penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode tahun 2010 – 2023 yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini atau variabilitas yang tidak terduga dalam data. Variabel eksternal yang tidak diperhitungkan dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Sektor Basis di DKI Jakarta. Sehubungan dengan implikasi dan keterbatasan ini, penelitian selanjutnya dapat lebih kritis dalam mengevaluasi hasil penelitian dan mempertimbangkan faktor–faktor tambahan yang mungkin memengaruhi analisis dan kebijakan–kebijakan yang sudah ada sehubungan PAD di Provinsi DKI Jakarta.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.155-168)
e-ISSN: 2581-1207

PENGHARGAAN

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para Pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta serta rekan-rekan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Angkatan Tahun 2022 yang telah memberikan kontribusi berupa masukan dan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antara, M. (2020). Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Bali. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 7*(2), 1-30.

Arief, G. I. (2009). Identifikasi dan Peran Sektor Ungggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta. *IPB Thesis*, 1-34.

Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat.* Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik. (2022, Februari 21). Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi. Jakarta, Indonesia.

Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 52-60.

Dewinta, S. D. (2022). Pengaruh Sektor-Sektor Potensial Terhadap Peningkatan PAD di Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 291-296.

DJPK Kemenkeu. (2019). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/-portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi=09&pemda=00

DJPK Kemenkeu. (2020). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/-portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi=09&pemda=00

DJPK Kemenkeu. (2021). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/-portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=09&pemda=00

DJPK Kemenkeu. (2022). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/-portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=09&pemda=00

DJPK Kemenkeu. (2023). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/-portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=09&pemda=00

Ferdiansyah, A. B., & Panjaitan, R. P. (2022). Sektor Unggulan dan Hubungannya dengan PAD di Kab. Klaten Tahun 2016 - 2021. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* , 73-89.

Humas Studio Statistika. (2024, November 28). *Studio Statistika*. Retrieved from Korelasi Pearson: https://ss.mipa.ub.ac.id/korelasi-pearson/

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.* Jakarta: Kanwil DJPb DKI Jakarta.

Lestari, A. A. (2013). Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sarolangun. 23-32.

Listiawati, & Siregar, S. (2023). Sektor Unggulan dan Hubungannya dengan Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1156-1166.

Pratama, M. P. (2020). Analisis dan Kontribusi Sektor Basis Non-Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 9*(1), 75-82.

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinnsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif, 14*(2), 115-121.

Sarwono. (2017). *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS.* Yogyakarta: Andi Offect.

Siallagan, & Hasudungan, A. R. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Blended Learning Sebagai Inovasi Model Pembelajaran di Era 21. *Universitas Negeri Medan*, 50-58.

Sianturi, M. K., & Tanjung, A. A. (2020). Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Dairi. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 266-275.

Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Temohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 127-138.

Ufittri, A. N., & Puspitasari, A. Y. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Arahan Pembangunan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 134-153.

Vikaliana, R. (2017). Analisis Identifikasi Sektor Perekonomian Sebagai Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 198-208.

Yuniara, W., & Mais, R. G. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-16.